

BAB I PENDAHULUAN

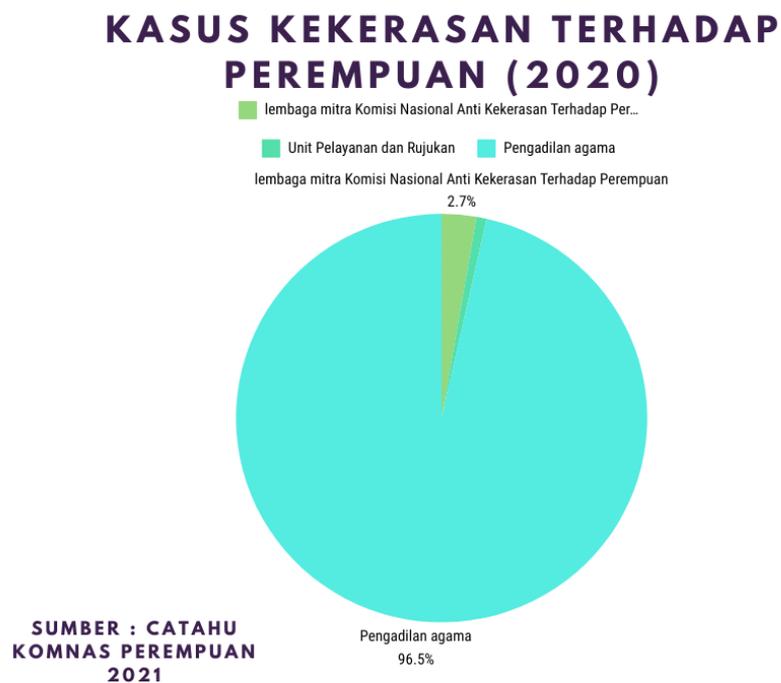
I.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi seharusnya bisa menjadi tempat yang aman dari kekerasan ketika menempuh Pendidikan. Namun, kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi. Oleh karena itu, semua pihak perguruan tinggi perlu pemahaman mendalam terhadap faktor risiko dan tantangan yang mungkin muncul. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius khususnya di lingkungan perguruan tinggi yang dapat mengancam keamanan serta kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam upaya pencegahan dan penanganannya, pemerintah telah menerbitkan peraturan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Peraturan ini membahas terkait pencegahan, penanganan, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satgas, hak korban dan saksi, serta pemantauan dan evaluasi.

Universitas Telkom merupakan salah perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Universitas Telkom telah memiliki 7 fakultas yakni Fakultas Rekayasa Industri, Fakultas Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Industri Kreatif, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dan Fakultas Ilmu Terapan. Dengan perbandingan 1:24 antara mahasiswa dengan dosen di Universitas Telkom menurut PPDIKTI, kekerasan seksual yang pernah terjadi di berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kritis di lingkungan pendidikan. Dalam upaya peningkatan kesadaran terhadap fenomena ini, serta penerapan kebijakan yang tepat dan penguatan upaya pencegahan dan perlindungan korban, merupakan hal yang penting dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, kekerasan seksual bisa terjadi tanpa terikat pada tempat, umur, serta status. Berdasarkan Gambar I.1, Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 mencapai 299.911 kasus. Data ini dikumpulkan dari tiga sumber yang berbeda: [1] Dari Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus.

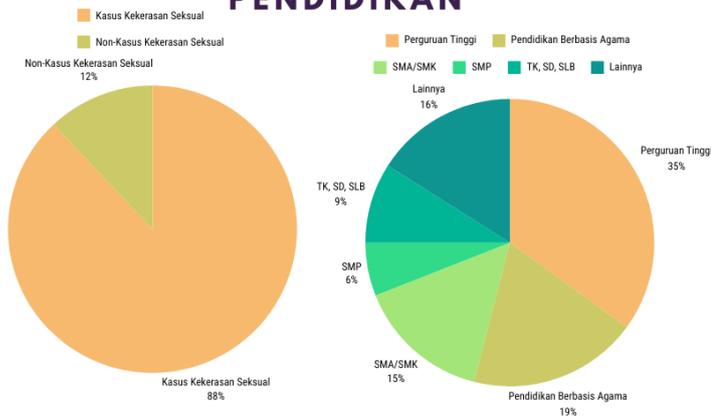
[2] Dari lembaga mitra Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terdapat 8.234 kasus. [3] Dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), yang merupakan unit yang dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan langsung dari korban, terdapat sebanyak 2.389 kasus. Penting untuk mencatat bahwa 2.134 dari kasus tersebut adalah kasus berbasis gender, sedangkan 255 kasus lainnya bukan kasus berbasis gender atau merupakan kasus informasi (Komnas Perempuan, 2021).



Gambar I.1 Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (2020)

Berdasarkan Gambar I.2 dapat dilihat bahwa terungkap bahwa 88% dari keseluruhan kasus kekerasan yang ada di lembaga pendidikan merupakan kasus kekerasan seksual. Lembaga pendidikan yang menjadi pelaku kasus jenis kekerasan dominan terjadi di perguruan tinggi sebesar 35%, pendidikan berbasis agama 19%, Tingkat SMA 15%, Tingkat SMP 6%, serta Tingkat TK, SD, SLB sebesar 9%. Berdasarkan data tersebut, kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi pernah terjadi di kampus sebanyak 77% menurut para dosen dan 63% di antaranya tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kampus (Dikjen Diktiristek, 2020).

KASUS KEKERASAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN



SUMBER : CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022

Gambar I.2 Kasus Kekerasan di Lembaga Pendidikan

Maraknya terjadinya kejadian pelecehan seksual di berbagai tempat khususnya di lingkup perguruan tinggi, Kemendikbud meluncurkan peraturan terkait pelecehan seksual yang tertulis pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Sebagai bentuk dari adanya permendikbudristek No 30 Tahun 2021, maka Rektor Universitas Telkom menetapkan SK No Nomor: KR.319/MHS2/KMH-KAR/2022 tentang Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Telkom. Dengan melihat jumlah civitas akademika Universitas Telkom pada Tabel I.1 serta potensi interaksi dan di lingkungan Universitas Telkom pada Gambar I.3 dapat menunjukkan bahwa potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bisa saja terjadi.

Tabel I.1 Jumlah Civitas Akademika Universitas Telkom

	Jumlah
Dosen	1094
TPA	536
Mahasiswa	37000

Sumber: Materi Presentasi Rapim, 2023



Gambar I.3 Potensi Interaksi di Lingkungan Universitas Telkom

Dalam melaksanakan fungsinya, Satgas PPKS Universitas bekerja sama dengan Satgas PPKS Tingkat fakultas. Perbedaan di antara keduanya adalah lingkup kerja yang ada di dalamnya. Satgas PPKS merupakan Satgas PPKS Universitas yang bertugas di lingkup di lingkup universitas serta menjadi penghubung antara Satgas PPKS Fakultas lainnya. Sedangkan Satgas PPKS Fakultas adalah Satgas PPKS yang bertugas di lingkup fakultas.

Tabel I.2 Potensi hubungan antara satgas PPKS di Lingkungan Universitas Telkom dengan pelaku dan korban

Pelaku	Korban	Satgas Fakultas	Satgas Universitas	SDM pusat
Mahasiswa Fakultas x	Mahasiswa Fakultas x	satgas fakultas x	-	-
Mahasiswa Fakultas x	dosen Fakultas x	satgas fakultas x	Satgas Universitas	SDM pusat
Mahasiswa Fakultas x	Mahasiswa Fakultas y	satgas fakultas x dan y	-	-
Mahasiswa Fakultas x	dosen Fakultas y	satgas fakultas x	Satgas Universitas	SDM pusat

Tabel I.2 Potensi hubungan antara satgas PPKS di Lingkungan Universitas Telkom dengan pelaku dan korban (Lanjutan)

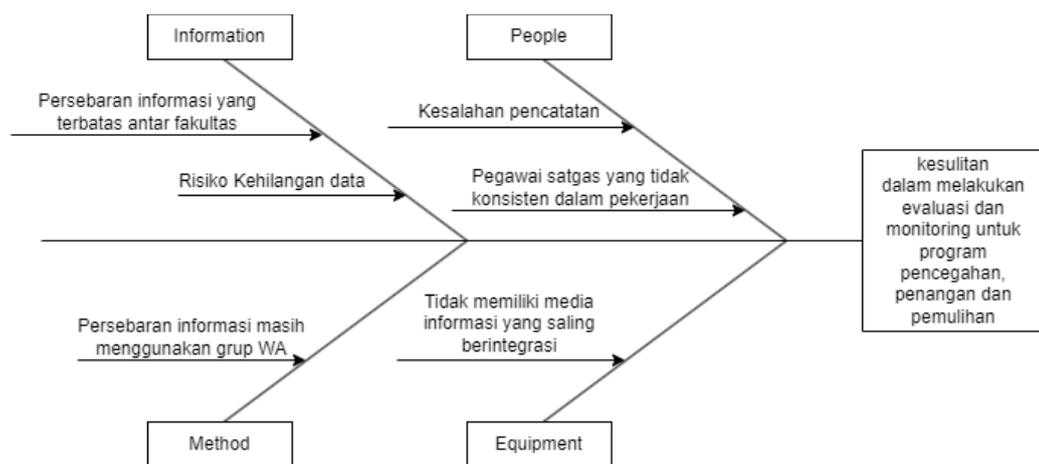
Pelaku	Korban	Satgas Fakultas	Satgas Universitas	SDM pusat
Mahasiswa Fakultas x	TPA	satgas fakultas x	Satgas Universitas	SDM pusat
Mahasiswa Fakultas x / Dosen / TPA	Orang Dewasa (umum)	satgas fakultas x	Satgas Universitas	SDM pusat
Mahasiswa Fakultas x / Dosen / TPA	Anak (umum)	satgas fakultas x	Satgas Universitas	SDM pusat
Dosen Fakultas x	Dosen Fakultas y	-	Satgas Universitas	SDM pusat
Dosen Fakultas x	TPA	-	Satgas Universitas	SDM pusat
TPA	TPA	-	Satgas Universitas	SDM pusat

Satgas PPKS Fakultas memiliki program kerja pada setiap fakultasnya. Perbedaan program kerja yang berbeda antar fakultas dapat mengurangi keefektifan pelaksanaan satgas PPKS di lingkup universitas karena harus *monitoring* kegiatan setiap fakultas yang memiliki program kerja berbeda-beda di dalamnya. Jika melihat pada Tabel I.2, hubungan antara Satgas PPKS Universitas, Satgas PPKS Fakultas, serta SDM Pusat dapat dikatakan rumit dan diperlukan dalam proses penanganan hampir pada setiap potensi kasus kekerasan seksual.

Dalam hal ini, *monitoring* dan evaluasi yang berjalan dan dilakukan secara manual dapat membantu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan PPKS karena akan terdapat banyak sekali atribut yang perlu dicatat oleh Satgas PPKS universitas. Satgas PPKS memiliki tugas yang selalu ada di program kerja, yaitu pencegahan,

penanganan, dan pemulihan terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan pada sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Universitas Telkom pada tanggal 30 November 2023, disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam bentuk verbal, non-verbal, fisik, serta melalui teknologi informasi.

Selain itu, disebutkan pula tentang cara kerja pencegahan dan penanganan yang nantinya akan dioperasikan oleh satgas PPKS. Bentuk pencegahan meliputi; Pembelajaran terkait pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, penguatan tata kelola, serta penguatan melalui komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui organisasi dan jaringan komunikasi informal maupun formal. Selain itu, terdapat penanganan dan pemulihan berupa penanganan korban melalui konseling, layanan kesehatan, hukum, dan lainnya oleh Lembaga hukum dan Asosiasi Psikolog Indonesia.



Gambar I.4 *Fishbone Diagram* Permasalahan *Monitoring* PPKS di Universitas Telkom

Berdasarkan Gambar I.4, permasalahan diatas disebabkan oleh beberapa faktor seperti; *information, method, people, equipment*. Dari beberapa penyebab permasalahan, besar kemungkinan faktor seperti *method* dan *information* menjadi penyebab utama dalam permasalahan seperti faktor dalam persebaran informasi dan integrasi setiap informasi. Dari beberapa permasalahan dengan faktor permasalahannya, hal ini dapat diatasi dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen Satuan Tugas PPKS Universitas Telkom.

I.2 Alternatif Solusi

Alternatif solusi merupakan identifikasi solusi dari permasalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian informasi pada setiap satgas PPKS serta pelapor dan/atau korban. Terdapat permasalahan yang diidentifikasi dan potensi solusi yang dilakukan pada tugas akhir yang dapat dilihat pada Tabel I.3.

Tabel I.3 Alternatif Solusi

No	Akar Masalah	Potensi Solusi
1	Kesalahan pencatatan	Pelatihan terhadap pegawai PPKS
2	Pegawai PPKS yang tidak konsisten dalam pekerjaan	Perancangan SOP kerja pegawai PPKS dengan sanksinya
3	Tidak memiliki media informasi yang saling berintegrasi	Perancangan sistem informasi manajemen Satuan Tugas PPKS Universitas Telkom
4	Persebaran informasi yang masih terbatas antar fakultas	
5	Risiko kehilangan data	
6	Persebaran informasi masih menggunakan grup WA	

Berdasarkan permasalahan dan alternatif solusi yang tertera pada Tabel I.3, akan dilakukan pemilihan alternatif solusi yang akan dilakukan, yaitu rancangan sistem informasi manajemen Satuan Tugas PPKS Universitas Telkom dengan metode *waterfall*. Perancangan sistem dapat menjadi media informasi yang saling berintegrasi antar petugas PPKS sehingga dapat meminimalisir ketidaksesuaian informasi dan memudahkan operasional kerja yang ada pada setiap petugas PPKS, khususnya petugas PPKS Fakultas.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diolah dan hasil analisis solusi dari alternatif solusi yang ada dan mendasari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian tugas akhir ini yaitu

1. Bagaimana rancangan sistem informasi manajemen Satuan Tugas PPKS Universitas Telkom?

2. Bagaimana proses bisnis usulan yang mendukung operasionalisasi sistem informasi manajemen untuk Satgas PPKS Universitas Telkom?

I.4 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian tugas akhir berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirancang yaitu;

1. Menghasilkan rancangan sistem informasi manajemen Satuan Tugas PPKS Universitas Telkom.
2. Menghasilkan proses bisnis usulan yang mendukung operasionalisasi sistem informasi manajemen untuk Satgas PPKS Universitas Telkom.

I.5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian tugas akhir berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu

1. Memudahkan Satgas PPKS untuk melakukan proses *monitoring* PPKS di Universitas Telkom.
2. Memudahkan persebaran informasi mengenai PPKS pada setiap Satgas PPKS Fakultas
3. Memiliki sistem informasi manajemen yang terintegrasi pada setiap satgas PPKS sehingga memudahkan proses operasional pada setiap satgas PPKS

I.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini, terdapat subbab yang terdiri dari; latar belakang, alternatif solusi, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori dasar tentang sistem, *monitoring*, *dashboard*, serta pemilihan metode, yaitu metode *waterfall*. Selain itu, *black box testing* serta *user acceptance testing* sebagai pengujian dalam penyelesaian masalah. Adanya teori dasar dapat membantu proses pengolahan laporan tersistematis berdasarkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan dan solusi terpilih.

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan secara mekanisme atau sebagai rencana dalam penyelesaian masalah yang terdiri dari definisi tahapan penyelesaian masalah yang terdapat pada sistematika perancangan, mekanisme pengumpulan data yang digunakan, mekanisme pengujian dengan menggunakan *black box testing*, hingga evaluasi hasil dari penyelesaian masalah menggunakan *user acceptance testing*, serta batasan dalam penyelesaian masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan mengenai uraian proses perancangan sistem dengan mengikuti struktur metode perancangan yang digunakan yaitu Metode *Waterfall* yang dimulai dari tahap *requirement*, proses pengumpulan dan pengolahan data dengan cara melakukan wawancara terhadap *stakeholder* dan mengelola data hasil wawancara. Selanjutnya, tahap desain kebutuhan untuk melakukan identifikasi proses bisnis, *stakeholder*, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan sistem. Selanjutnya, masuk ke tahap desain sistem untuk melakukan perancangan basis data menggunakan UML (*use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram*). Selanjutnya, tahap *implementation* dengan membuat *mockup* sistem dan mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai alat pengembang rancangan sistem. Terakhir, tahap *verification* dengan melakukan pengujian terhadap hasil rancangan sistem dengan menggunakan *black box testing* dan *User Acceptance Testing (UAT)*.

BAB V ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai analisis terkait sistem yang dirancang dengan yang dibagi menjadi beberapa penjelasan. Pertama, analisis dilakukan dengan melakukan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi sistem. Selanjutnya, akan dilakukan analisis proses bisnis usulan yang mengukung sistem di dalam proses bisnis eksisting. Selanjutnya, pembahasan terkait kekurangan dan kelebihan sistem yang telah

dirancang sebagai referensi untuk pengembangan sistem selanjutnya. Terakhir, pembahasan terkait rencana implementasi di lapangan berupa rangkaian aktivitas hingga jadwal aktivitas yang akan dilalui.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari tugas akhir yang dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memberikan saran bagi peneliti selanjutnya berdasarkan analisis rekomendasi pengembangan sistem yang telah dibahas pada bab sebelumnya.